



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2484>
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

PERAN DINAS SOSIAL SOSIAL DALAM REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI JOMBANG

Diana Rahmawati

Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

diana.r@ubhara.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 20 Oktober 2022

Revised date: 22 Oktober 2022

Accepted date: 02 November 2022

ABSTRACT

This study aims to determine 1. How is the role of the social service in handling ODGJ in Jombang Regency. 2. Obstacles experienced by the Social Service in handling ODGJ in Jombang Regency. 3. Effectiveness of ODGJ Rehabilitation at the Social Service of Jombang Regency. This type of research is qualitative, this type of research does not use calculation procedures or numbers and does not use measuring instruments. This qualitative method only describes an event or events. Sources of data used are primary and secondary sources. The results showed that the role of the Social Service in handling ODGJ patients was quite good. In addition, the Social Service has carried out its role in handling ODGJ sufferers in Jombang Regency, namely providing skills guidance, physical guidance, and spiritual guidance. Constraints faced in handling ODGJ are due to lack of human resources, inadequate infrastructure, low community participation, lack of budget, this is the obstacle why until now the handling of the Rehabilitation of People with Mental Disorders (ODGJ) is still not fully effective. the Ministry of Social Affairs is also experiencing problems due to lack of funds.

Keywords: Role, Rehabilitation, ODGJ

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Bagaimana peran dinas sosial dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Jombang. 2. Kendala yang dialami oleh Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Jombang. 3. Efektivitas Rehabilitasi ODGJ pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang jenis penelitiannya tidak menggunakan prosedur perhitungan atau angka-angka dan tidak menggunakan alat ukur, Metode kualitatif ini hanya memaparkan suatu peristiwa atau kejadian. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan juga sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam penanganan penderita ODGJ sudah cukup baik, Selain itu Dinas Sosial telah menjalankan perannya dalam penanganan Penyandang ODGJ di Kabupaten Jombang yaitu memberikan bimbingan keterampilan, bimbingan fisik, dan bimbingan kerohanian. Kendala yang dihadapi dalam penanganan ODGJ ini karena masih Kekurangan sumber daya manusia, Sarana prasarana yang kurang memadai, Rendahnya Partisipasi masyarakat, Minimnya Anggaran, hal inilah yang menjadi hambatan mengapa sampai saat ini penanganan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih belum efektif sepenuhnya, Dinas Sosial juga mengalami hambatan karena kurangnya dana.

Kata Kunci: Peran, Rehabilitasi, ODGJ.

2022 UPNVJT. All rights reserved

PENDAHULUAN

Masalah kesehatan jiwa merupakan masalah kesehatan global yang sangat serius. Menurut World

federation of mental health (WFMH) dalam (Tenri, 2021) fakta yang mencengangkan adalah satu dari empat orang dewasa akan mengalami masalah

kesehatan jiwa pada satu waktu yang terjadi dalam hidupnya. Selanjutnya menurut World health organization (WHO) hampir 400 juta penduduk dunia menderita masalah kesehatan jiwa dan gangguan perilaku. Bahkan setiap 40 detik di suatu tempat di dunia ini ada seseorang yang meninggal karena bunuh diri.

Kesehatan jiwa adalah hal yang penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, Nisa et al., (2020) mengatakan bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan masalah yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka penderita gangguan jiwa yang terjadi di Indonesia dan terus mengalami peningkatan. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat (Noviati, 2017).

Menurut data dari badan penelitian dan pengembangan kesehatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menyebutkan bahwa jumlah gangguan jiwa di Indonesia mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan Riskeddas 2013. Pada Riskeddas Tahun 2013 berada pada angka 1,7% dan mengalami kenaikan menjadi 75% pada Riskeddas Tahun 2018. Peningkatan ini bisa dilihat dari kenaikan jumlah rumah tangga yang mempunyai keluarga gangguan jiwa yaitu menjadi 7 per mil rumah tangga, yaitu dari 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga yang memiliki penyakit gangguan jiwa. Sehingga jumlahnya bisa diperkirakan 450 ribu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat.

Notosoedirdjo dalam Audina et al (2019), mendefinisikan gangguan jiwa adalah sindrom atau pola psikologis, pola perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada individu dan dihubungkan dengan adanya distress atau disabilitas dan disertai peningkatan resiko secara bermagna untuk mati, sakit, ketidakmampuan, atau kehilangan kebebasan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam berpikir, berperilaku, dan sebuah gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, sehingga dapat mengakibatkan

penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Menurut Darmawan & Adiwidjaja, (2019) Sudah menjadi sebuah keharusan bagi suatu negara untuk merespon berbagai macam permasalahan yang muncul dimana permasalahan setiap negara akan berbeda dan akan berbeda pula dalam merespon permasalahan tersebut.

Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di kabupaten jombang. Menurut Djamaludin dan Kartini, 2001 dalam (Mayaut & Asrori, 2020) penyebab terjadinya gangguan jiwa seperti yang dikemukakan diatas disimpulkan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh karena ketidak mampuan manusia untuk mengatasi konflik dalam diri, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, perasaan kurang diperhatikan (kurang dicintai) dan perasaan rendah diri. Banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa banyak ditemukan disekitar kota jombang, diperlukan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Upaya rehabilitasi biasanya dilakukan di panti sosial milik pemerintah, baik pemerintah daerah atau swasta. Dinas sosial Kabupaten Jombang juga mempunyai kewajiban untuk memberikan rehabilitasi sosial kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Salah satu yang memiliki tenaga pekerja sosial profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yaitu Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial Juga mempunyai tugas melakukan dan mengembangkan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu. Peran pemerintah dan masyarakat disekitar sangat diperlukan agar tidak acuh apabila ditemukan adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang hidup di jalanan. Ataupun penderita gangguan jiwa yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jombang".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang jenis penelitiannya tidak menggunakan prosedur perhitungan atau angka angka dan tidak menggunakan alat ukur. enelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan (Umar Sidiq, 2019). Selanjutnya, menurut Nawawi, 1994:75 dalam Affrian (2019), jenis penelitian Kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan berupaya untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya. Mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif. Sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Artinya penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang nampak secara eksplisit saja, melainkan melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap obyek diteliti.

2. Wawancara

Yaitu dengan cara wawancara langsung pada responden untuk mendapatkan berbagai informasi yang akurat menyangkut masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Yaitu dengan mencatat dan mempelajari catatan atau dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menguraikan seluruh hasil pengumpulan data penelitian tentang Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jombang.

1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Jombang Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Rehabilitasi Sosial ini dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Jombang. Melalui beberapa pendekatan berbagai program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Program-program rehabilitasi sosial untuk penderita gangguan jiwa yang ada di selenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Jombang seperti; bimbingan keterampilan, bimbingan fisik, dan bimbingan kerohanian.

Dinas Sosial selaku dinas yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penderita ODGJ terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi beban keluarga, dan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di kabupaten jombang, serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penderita ODGJ itu sendiri.

2. Dinas Sosial Kabupaten Jombang juga melakukan pembinaan kader-kader Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Posyandu Kesehatan Jiwa (PUSKESWA) yang ada di setiap kecamatan. Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Jombang juga memberikan keterampilan kerja untuk peserta eks gangguan jiwa. Bimbingan Ketrampilan ini bertujuan agar peserts eks gangguan jiwa mempunyai ketrampilan yang sesuai dengan minatnya untuk menjamin masa depan yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi lingkungannya. Bentuk kegiatan bimbingan keterampilan ini meliputi: bimbingan ketrampilan olahan panganan, bimbingan ketrampilan menjahit.

3. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Jombang Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Yang termasuk kendala yaitu: Kekurangan sumber daya manusia, Sarana prasarana yang kurang memadai, Rendahnya Partisipasi masyarakat, Minimnya Anggaran.

4. Efektifitas Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Dalam melaksanakan program Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dinas Sosial Kabupaten Jombang masih dikatakan belum efektif dikarenakan adanya kendala yang masih dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam

melaksanakan program Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Faktor-faktor yang harus memberi pengaruh yang positif terhadap jalannya efektifitas rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jombang yaitu:

- a) Dukungan Keluarga, sangat mendukung dalam rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa, baik dalam bentuk kesejahteraan penyandang disabilitas maupun pemulihan dalam diri Orang Dengan Gangguan Jiwa. Peran keluarga sangat diharapkan dalam pemenuhan penyandang disabilitas. Peran keluarga sangat memberikan dampak positif terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), jika keluarga salah mendidik atau bersikap acuh maka dampaknya akan buruk.
- b) Dukungan masyarakat merupakan faktor penting dalam berjalannya suatu efektifitas suatu program. Dengan adanya dukungan dari masyarakat diharapkan untuk mendukung pemulihan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak dari kalangan masyarakat yang kurang menerima penyandang disabilitas mental hisup diantara mereka, karena factor tersebut penyandang Disabilitas Mental memiliki kesempatan yang minim dalam memperoleh pekerjaan.
- c) Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, dalam tercapainya efektifitas kerja suatu program maka perlu adanya sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung program yang dijalankan. Dalam mendukung program yang diberikan oleh pemerintah mengenai rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa masih mengalami kurangnya anggota dalam penanganan Disabilitas, karena ada juga pegawai yang menjabat di bagian kasubag umum namun juga menangani penyandang disabilitas mental, sehingga mempengaruhi kinerja dalam suatu pekerjaan menjadi kurang efisien dalam pengimplementasiannya.
- d) Kerja sama Dinas Sosial Dengan Lembaga Lain, untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing instansi pemerintah maupun swasta yang telah bergabung dengan Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Pembahasan

Efektivitas merupakan suatu entitas yang selalu ada dalam pengukuran sebuah program. Menurut Wicaksono 2013: 9 dalam Darmawan & Adiwidjaja (2019), efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. ODGJ mempunyai berbagai macam kebutuhan agar mereka dapat pulih dan berfungsi kembali di masyarakat sebagaimana orang pada umumnya. Untuk kembali ke masyarakat, orang dengan gangguan jiwa harus mendapatkan upaya kesehatan jiwa yang optimal. Upaya kesehatan jiwa yang dimaksud juga diperuntukan bagi ODGJ terlantar dan ditelantarkan (Simanjuntak, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, Kendala yang dihadapi dalam penanganan ODGJ ini karena masih Kekurangan sumber daya manusia, Sarana prasarana yang kurang memadai, Rendahnya Partisipasi masyarakat, Minimnya Anggaran, hal inilah yang menjadi hambatan mengapa sampai saat ini penanganan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih belum efektif sepenuhnya, Dinas Sosial juga mengalami hambatan karena kurangnya dana.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ ini sangat penting untuk menuntaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang. Dinas sosial di Kabupaten Jombang dalam menangani ODGJ belum efektif karena masih banyak kendala yang terjadi. Ada beberapa kendala yaitu Kekurangan sumber daya manusia, Sarana prasarana yang kurang memadai, Rendahnya Partisipasi masyarakat, Minimnya Anggaran.

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa usaha-usaha untuk menangani ODGJ yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial sudah berjalan cukup baik, namun dalam penanganan ODGJ Dinas Sosial memiliki hambatan-hambatan yang akan mempersulit peran. Adapun hambatan-hambatan itu antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia

Kurangnya para pekerja sosial profesional yang menangani masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kebanyakan pegawai yang ada di Dinas sosial berlatarbelakang ilmu hukum, ilmu sosial. Sehingga dalam penanganannya mereka kurang paham cara menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

2. Sarana Prasarana yang kurang memadai

Tidak adanya sarana prasarana arana dan prasarana lainnya seperti tempat kesehatan khusus atau wadah untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dirawat, sehingga rehabilitasi biasanya dikembalikan ke keluarga melalui proses assessment.

3. Rendahnya partisipasi masyarakat

Masih terdapat lingkungan masyarakat yang kurang mendukung keberadaan ODGJ seperti mengejek, menjauhi ODGJ, yang menyebabkan kondisi ODGJ tidak sembuh sembuh.

4. Minimnya Anggaran

Hambatannya dalam menangani rehabilitasi ODGJ ini salah satunya yaitu minimnya APBD yang diberikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam melaksanakan sebuah peran, Dinas Sosial Kabupaten Jombang dikatakan sudah melaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang menangani rehabilitasi diluar panti dan didalam panti. Tetapi belum efektif dikarenakan masih ada kendala-kendala yang terjadi dalam menjalankan program rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa meliputi Kurangnya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Kurang memadai, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, Kurangnya anggaran dalam menjalankan program. Efektifitas program rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang kurang baik dan kurang efektif, hal ini karena masih banyak kendala kendala dalam melaksanakan program rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa seperti kekurangan tenaga kesejahteraan sosial, belum adanya sarana prasarana untuk rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

REFERENCES

Affrian, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Al'iidara Balad*, 1(1), 85–95. <https://doi.org/10.36658/ane2108.v1i1.46>

- Amaliah, A., & Hermansyah, H. (2022). *Implementasi Community Relations Dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Pasca Pandemi Covid-19. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2).
- Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019). *Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Kota Sukabumi. PAPANUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(2), 28–38. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.3>
- Darmawan, R., & Adiwidjaja, I. (2019). *Efektivitas kebijakan dinas sosial dalam menanggulangi PMKS khusus ODGJ terlantar di Kota Batu. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 165–174. www.publikasi.unitri.ac.id
- Mayaut, F. G., & Asrori, M. (2020). *Peran Aktif Pekerja Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 Ciracas Jakarta Timur*. 7(2), 57–81.
- Mindarti, L. I. (2018). *Model Inovasi Pelayanan Kesehatan Melalui Program Gerakan Serentak Keluarga Siaga (GERTAK KASI)(Studi Pada Puskesmas Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang). Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2).
- Nisa, S. A., Hasanbasri, M., & Priyatni, N. (2020). *Peran Stakeholder Terhadap Program Kesehatan Jiwa Dalam Penanggulangan Pasung Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)*, 23(02), 58–67. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk>
- Noviati, D. W. (2017). *Koordinasi Antara Dinas Kesejahteraan*. 5(1), 37–50.
- Simanjuntak, N. O. (2017). *Hak pelayanan dan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar menurut UU No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa (Studi kasus UPT wanita tuna susila dan tuna laras Berastagi). Jurnal Psuham Unimed*, 7(18), 54–76. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jh/article/view/10887>
- Tenri, A. (2021). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten*

Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 179.

<https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2154>

Umar Sidiq, M. C. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV. Nata Karya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. (2014). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*. Pemerintah Pusat, 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38646/uu-no-18-tahun-2014>